Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Volume: 1, Nomor: 2, (2025), April: 278 - 290
Link Publish: https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/jggmultidisciplinary/article/view/270
E-ISSN: 3123-6278; DOI: https://doi.org/10.65244/jggm.v1i2.270

Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Khadijah Nur Aini [1], Selfi Okta Rahmadini [2], Feri Arifin [3], Reni Ria Armayani Hasibuan [4]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia [1,2,3,4]
Corresponding Author: khadijahnuraini720@gmail.com[1], selfiokta60@gmail.com[2], feriarifin51@gmail.com[3], reniriaarmayani@uinsu.ac.id[4]

Info Artikel
Submitted: *01 April 2025*
Revised : *09 April 2025*
Accepted: *23 April 2025*
Published: *30 April 2025*

Keywords: *Digital technology, financing institutions, law, fintech, regulation*

Kata Kunci*: Perkembangan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Distribusi Manfaat.*

Abstract
This study examines how Indonesia's economy has developed and its effects on people's welfare by analyzing macroeconomic indicators and social factors that influence wealth distribution. Data obtained from official sources and national statistics were processed descriptively to explore the relationship between economic growth and improvements in quality of life. The results of the study show that fair and sustainable economic growth can reduce poverty and improve the distribution of benefits; however, challenges such as regional inequality and income disparities remain major obstacles to achieving equitable prosperity. In conclusion, the role of the government, society, and the private sector is crucial to ensuring that the results of growth are distributed fairly and sustainably.

Abstrak
Studi ini mengkaji bagaimana ekonomi Indonesia berkembang dan efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan cara menganalisis indikator-indikator makro ekonomi serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi penyebaran kekayaan. Data yang diperoleh dari sumber resmi dan statistik nasional diolah secara deskriptif untuk menggali keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dapat menekan angka kemiskinan serta memperbaiki distribusi manfaat; meskipun demikian, tantangan seperti ketidaksetaraan antar wilayah dan perbedaan pendapatan masih menjadi penghalang utama untuk mencapai kemakmuran yang merata. Sebagai kesimpulan, peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat krusial untuk memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan dapat didistribusikan dengan adil dan bertahan lama.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di sebuah negara adalah perubahan struktur ekonomi, yang disertai dengan kenaikan produk domestik bruto (PDB), efisiensi produksi, pembagian pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, perhatian terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi fokus utama sejak negara ini merdeka, dengan tujuan tidak hanya memperkuat laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh warga. Secara konseptual,

pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya penumpukan modal, tenaga kerja, teknologi, serta efisiensi dalam produksi, yang secara keseluruhan meningkatkan hasil nasional dalam jangka waktu yang lebih panjang. Definisi ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Sukirno, yang melihat pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, selama distribusi hasilnya adil dan merata (Nurhasanah & Muzdalifah, 2024).

Perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola pertumbuhan yang menggembirakan, walaupun terdapat perubahan karena faktor-faktor global dan domestik. Pertumbuhan ini telah membantu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, yang merupakan ukuran penting dari kesejahteraan masyarakat. Namun, ketidakmerataan pendapatan serta pembagian kekayaan yang tidak seimbang di berbagai wilayah masih menjadi tantangan besar bagi distribusi manfaat pembangunan. Sebuah penelitian oleh (Dieda et al., 2023) mengungkapkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan masih menjadi penghalang bagi kesejahteraan di banyak provinsi.

Dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat kompleks dan tidak dapat diukur hanya melalui peningkatan ekonomi, melainkan perlu memperhatikan berbagai elemen seperti gaji, pendidikan, investasi, dan kebijakan publik. Seperti pada penelitian (Durrotun, 2024) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi serta upah minimum di suatu daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan yang inklusif dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Selain itu, kelembagaan ekonomi juga berdampak pada pengaruh pertumbuhan terhadap kualitas hidup masyarakat. Lestari dan rekan-rekannya menegaskan dalam studi mereka bahwa adanya koperasi di Indonesia, melalui peningkatan modal sosial dan skala usaha, berkontribusi pada kesejahteraan para anggotanya, meskipun faktor makroekonomi di tingkat daerah memiliki dampak yang tidak langsung terhadap kesejahteraan. Ini menyoroti betapa pentingnya peran lembaga ekonomi dalam mengoptimalkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah masalah rumit namun sangat signifikan, karena memberikan pemahaman mengenai dinamika makro ekonomi yang secara langsung berdampak pada tingkat hidup.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini adalah mengkaji literatur dengan mengumpulkan informasi atau data sekunder dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, laporan statistik, dan penelitian akademis yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Pendekatan analisis bersifat deskriptif dan komparatif, dengan tujuan untuk menggambarkan hubungan antara indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui survei atau wawancara, melainkan mengkaji data yang sudah tersedia secara sistematis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi dan dampaknya, serta faktor-faktor yang mendukung atau penghambat dalam pencapaian pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep dan Indikator Perekonomian Indonesia

Dalam ilmu ekonomi, perekonomian Indonesia dapat dilihat sebagai seluruh kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di negara ini. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses di mana kapasitas ekonomi berkembang untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu yang lebih panjang, yang terwujud dalam peningkatan pendapatan nasional serta output per orang. Dalam definisi mengenai ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering diartikan sebagai peningkatan produksi ekonomi suatu negara, yang berimplikasi pada peningkatan kesempatan bagi penduduk dalam hal konsumsi, lapangan pekerjaan, serta akses terhadap kebutuhan pokok seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Indikator yang sering dipakai untuk mengevaluasi kemajuan ekonomi Indonesia meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, persentase pengangguran terbuka, laju inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PDB mencerminkan total nilai semua produk dan layanan yang dihasilkan oleh ekonomi dalam suatu periode tertentu, sementara PDB per kapita menunjukkan rata-rata hasil ekonomi untuk setiap individu. Indeks seperti IPM meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang memadai, yang berhubungan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat. Penelitian empiris mengindikasikan bahwa indikator-indikator ini memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah penelitian di provinsi Nusa Tenggara Barat

mengungkapkan bahwa variabel PDB, pertumbuhan ekonomi, dan IPM memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana IPM menunjukkan hubungan negatif dengan kemiskinan, yang berarti bahwa semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan (Ali et al., 2024).

Selain itu, indikator tenaga kerja seperti tingkat pengangguran terbuka juga penting untuk mengevaluasi dinamika ekonomi, karena tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan rumah tangga dan memperburuk kesejahteraan masyarakat. Sebuah penelitian yang mempelajari hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan pengangguran berdampak pada peningkatan kemiskinan, sedangkan penurunan pengangguran berdampak sebaliknya, yang menyebabkan peningkatan pendapatan dan konsumsi rumah tangga (Gozali & Nurikmah, 2025).

Selain indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan dan tingkat pengangguran, ketidakmerataan pendapatan juga menjadi ukuran penting yang mencerminkan mutu dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi dapat mengurangi efek positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena beberapa kelompok tertentu dalam masyarakat tidak dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut dengan adil. Penelitian mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan di sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada tingkat ketidakmerataan pendapatan, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan ini melibatkan banyak dimensi dalam mengevaluasi kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari indikator seperti HDI, yang mengaitkan elemen-elemen seperti kesehatan (harapan hidup), pendidikan (lama pendidikan), dan kualitas hidup yang layak (pengeluaran per orang). Indeks ini bukan hanya sekadar ukuran kesejahteraan, tetapi juga menjadi acuan untuk kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai penelitian di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan tingkat kemiskinan berdampak pada HDI, yang menegaskan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan kondisi ekonomi yang stabil serta akses yang merata terhadap layanan dasar (Awary & Nilasari, 2025).

Secara keseluruhan, gagasan mengenai ekonomi Indonesia, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan hubungan antara indikator-indikator makroekonomi

(seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan) dan indikator sosioekonomi yang bersifat multidimensional (seperti Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat kemiskinan). Indikator-indikator tersebut saling mendukung dan memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

B. Dinamika Perkembangan Perekonomian Indonesia

Ekonomi Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar 2,07% pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang berdampak pada sektor konsumsi dan ekspor. Proses pemulihan dimulai pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,69%, yang didorong oleh kebijakan fiskal seperti Paket Stimulus Ekonomi Nasional (PEN) yang bernilai triliunan rupiah untuk meningkatkan pengeluaran domestik. Diperkirakan pertumbuhan yang stabil di atas 5% akan terjadi pada tahun 2022-2023, berkat pengendalian laju inflasi serta peningkatan investasi, yang mencapai 5,05% pada tahun 2023.

Pada kuartal ketiga tahun 2025, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 5,04%, mencapai angka nominal PDB sebesar USD 1. 396 miliar dan PDB per kapita sebesar USD 4. 960, menjadikannya sebagai ekonomi terbesar kedelapan di dunia ketika dihitung berdasarkan paritas daya beli (PPP). Sektor konsumsi domestik memberikan kontribusi sebesar 54,5% terhadap total PDB, didorong oleh indeks kepercayaan konsumen yang berada di angka 124,0 serta indeks manajer pembelian industri yang mencatat angka 53,3, menandakan adanya pertumbuhan. Total investasi dari kuartal satu hingga kuartal sembilan tahun 2025 tercatat mencapai 1. 434 triliun rupee, dengan peningkatan tahunan sebesar 13,7%, sedangkan surplus perdagangan telah mencapai USD 35,88 miliar untuk bulan ke-66 secara berturut-turut. Tingkat inflasi tetap terjaga pada angka 2,72%, dan cadangan devisa yang mencapai USD 150 miliar semakin memperkuat stabilitas ekonomi.

Meskipun terdapat peningkatan, ketimpangan penghasilan antardaerah memburuk antara tahun 2017 dan 2023, walaupun hampir setengah dari daerah tersebut memiliki perekonomian yang inklusif (pertumbuhan rendah, ketimpangan rendah). Angka pengangguran terbuka menurun menjadi 4,85%, angka kemiskinan menjadi 8,47%, dan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,85% pada tahun 2025; akan tetapi, perbedaan antar wilayah menghalangi sebaran manfaat. Hubungan negatif antara pertumbuhan dan ketidaksetaraan tidak signifikan secara statistik, yang menunjukkan perlunya adanya kebijakan redistribusi (Sari & Santoso, 2024).

Pertumbuhan ekonomi berperan dalam meningkatkan HDI lewat peningkatan pendapatan per individu dan kesempatan kerja, namun kemiskinan memberikan pengaruh buruk yang besar terhadap HDI. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran memberikan kontribusi sebesar 92% dalam kenaikan HDI, meskipun ketimpangan antar daerah menghambat pemerataan kekayaan yang seimbang. Untuk mengubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang merata, diperlukan pembangunan yang inklusif melalui investasi pada infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (Sultan et al., 2023).

Prakiraan untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan akan tetap stabil di angka 5%, dengan penekanan pada reformasi struktural untuk meningkatkan inklusivitas. Pemerintah dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas melalui investasi dan program sosial sekaligus mengurangi kesenjangan antar daerah. Jika langkah-langkah inklusif dilaksanakan secara konsisten, dinamika ini dapat menghasilkan kemakmuran yang berkelanjutan.

C. Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat utama untuk memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang disetujui oleh Parlemen pada bulan September 2025 dan menekankan pada penyelarasan pendanaan untuk sektor-sektor vital seperti industri yang padat karya, sektor pertanian, dan sektor pariwisata. Pemerintah menyediakan insentif seperti pengurangan PPN untuk properti dan kendaraan listrik, serta subsidi pajak untuk industri padat karya, disertai dengan program-program seperti "Makan Bergizi Gratis" (MBG) dan "Kredit Usaha Rakyat" (KUR), yang berfungsi dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan upah minimum di tahun 2024, pencairan Total Penerimaan (THR), dan peningkatan bantuan sosial berperan dalam mendorong pertumbuhan konsumsi pribadi sebesar 4,89 persen pada triwulan pertama tahun 2025. Kebijakan ini telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian yang terjadi di tingkat global, sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah penelitian mengenai dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan PDB di tingkat provinsi.

Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI di tingkat 4,75 persen guna menjaga keseimbangan ekonomi secara keseluruhan, mengendalikan laju inflasi, serta mendukung ketersediaan likuiditas bagi bank, yang pada akhirnya akan mendorong upaya investasi. Kebijakan ini berfungsi sebagai pelengkap kebijakan fiskal dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan risiko terkait fluktuasi harga komoditas global, sehingga dapat memastikan

pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen pada tahun 2024 meskipun terdapat tantangan dari luar negeri. Berbagai program seperti subsidi untuk listrik dan jalan tol selama bulan Ramadan serta pada akhir tahun akan memperkuat langkah-langkah kebijakan moneter yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan positif antara kebijakan moneter dan produk domestik bruto, di mana suku bunga BI dengan efektif mampu menekan inflasi sambil tetap menjaga produksi ekonomi (Olivia et al., 2024).

Pemerintah mendorong pengembangan baru melalui sektor ekonomi yang ramah lingkungan dan teknologi digital, termasuk komitmen JETP sebesar 21,4 miliar dolar AS untuk peralihan energi, pembangunan fasilitas pembangkit tenaga surya, bioenergi B40/B50, dan Jaringan Super Hijau sepanjang 70. 000 km. Proyek hilir serta CCS/CCUS senilai 15 miliar dolar AS membuka jalan bagi investasi rendah karbon, sementara inisiatif EPIC Sale, Harbolnas, dan BINA bertujuan untuk mencapai transaksi triliunan rupiah bagi UKM digital. Kebijakan ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan hingga tahun 2026 tetapi juga menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa subsidi dan belanja pemerintah memberikan efek positif pada pertumbuhan yang berkelanjutan (Aji & Wijayanti, 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan tersebut memberikan efek positif bagi kemakmuran, dengan angka pengangguran berkurang dari 4,82 persen (2024) menjadi 4,76 persen (2025) dan terciptanya 3,59 juta kesempatan kerja. Penurunan tingkat kemiskinan terlihat berkat program bantuan sosial yang efektif dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, walaupun ketidakmerataan antar daerah masih menjadi masalah. Inisiatif pekerjaan padat karya dan insentif pajak berkontribusi pada peningkatan pendapatan per orang serta memperluas akses terhadap layanan publik. Hasil analisis regresi panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pendidikan berpengaruh besar terhadap kemakmuran.

Walaupun mencapai sukses, kebijakan ini menghadirkan ancaman bagi anggaran yang berkelanjutan dan inflasi sebagai akibat dari langkah stimulus yang terlalu besar serta ketergantungan pada ekspor barang mentah. Pemerintah perlu memperkuat reformasi dalam birokrasi, mendukung kegiatan bisnis, dan mendorong pemerataan pendapatan untuk meraih sasaran pertumbuhan menengah sebesar delapan persen. Prospek tahun 2026 terlihat positif berkat kolaborasi antara sektor publik dan privat, yang memberikan harapan untuk distribusi kekayaan yang lebih merata. Penelitian OLS menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel kekayaan seperti kemiskinan, tingkat pengangguran, dan produk domestik bruto.

D. Implikasi Perkembangan Perekonomian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

1. Dampak Positif Pertumbuhan Perekonomian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang konsisten merupakan dasar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Saat ekonomi berkembang, sektor industri dan jasa mengalami kemajuan yang pesat, yang secara langsung menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Meningkatnya jumlah pekerjaan memberikan masyarakat akses ke pendapatan tetap, sehingga memperbaiki daya beli mereka dan membantu mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Saputra et al., 2022).

Selain memperbesar pendapatan individu, perkembangan ekonomi juga memberikan sumber daya kepada pemerintah guna memperbaiki mutu layanan publik melalui peningkatan pendapatan negara. Uang yang didapat dari aktivitas ekonomi yang produktif dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur penting seperti fasilitas kesehatan yang lebih modern dan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Perubahan ini menjamin bahwa masyarakat tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga merasakan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik melalui layanan kesehatan yang memadai dan akses pendidikan yang adil untuk generasi yang akan datang.

Dalam jangka waktu yang panjang, pertumbuhan ekonomi menghasilkan kestabilan sosial dan mendorong terjadinya inovasi di berbagai sektor masyarakat. Peningkatan kesejahteraan biasanya dapat mengurangi kesenjangan sosial serta kemungkinan terjadinya konflik di dalam suatu komunitas, karena sumber daya dikelola dengan lebih efisien. Selain itu, individu yang berada dalam keadaan ekonomi yang baik dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan diri dan teknologi, yang pada akhirnya menghasilkan siklus kemakmuran yang terus menerus dan memperkuat daya tahan negara menghadapi berbagai tantangan global.

2. Ketimpangan Sosial Ekonomi Sebagai Dampak Pembangunan

Proses perkembangan yang tidak seimbang sering kali mengakibatkan perbedaan antar daerah, dengan kemajuan hanya terfokus di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi pusat pertumbuhan. Ini berujung pada ketidakadilan ekonomi, yang terlihat jelas melalui kekuasaan elit dalam menguasai sumber daya nasional, sementara masyarakat di wilayah terpencil tetap mengalami produktivitas yang rendah. Ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya ini menghalangi akses modal untuk kelas bawah dengan efektif, sehingga menghasilkan jarak pendapatan yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin seiring dengan bertambahnya pertumbuhan nasional (Hababil et al.,

2024).

Dari sudut pandang sosiologi, ketidaksetaraan ini menyebabkan isolasi sosial, di mana kalangan bawah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan publik dasar seperti pendidikan yang baik dan kesehatan. Perbedaan dalam akses ini menghalangi kemajuan sosial, sehingga kemiskinan sering kali menjadi masalah struktural yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apabila ketimpangan dalam tingkat kehidupan ini terus berlanjut tanpa adanya upaya redistribusi yang efektif, maka akan menimbulkan kerentanan sosial yang tinggi, memudarnya rasa saling percaya di antara warga, dan meningkatnya kemungkinan terjadinya ketegangan sosial (Choiri et al., 2025).

3. Analisis Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan

Kesejahteraan masyarakat di wilayah kota biasanya diukur melalui ketersediaan infrastruktur modern, fasilitas belanja, dan variasi lapangan kerja dalam sektor resmi. Meskipun penghasilan rata-rata warga kota umumnya lebih tinggi, mereka sering kali harus menghadapi biaya hidup yang cukup mahal serta tantangan lingkungan seperti polusi dan kepadatan penduduk. Dengan demikian, kesejahteraan di area perkotaan tidak hanya tergantung pada pendapatan nominal, tetapi juga pada kemampuan individu untuk mengelola pengeluaran yang tinggi serta menjaga kesehatan mental mereka di tengah ritme kehidupan kota yang cepat (Hasibuan et al., 2020).

Kemakmuran di wilayah pedesaan sangat tergantung pada industri pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Warga desa biasanya memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, karena mereka berada dekat dengan sumber-sumber produksi dan didukung oleh hubungan sosial yang kuat dan saling membantu. Namun, tantangan utama di area ini adalah akses yang terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya teknologi yang mendukung perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun dampak pada lingkungan lebih rendah, potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sering terhambat oleh keterbatasan dalam mengakses inovasi dan pasar yang lebih luas.

Kesenjangan kekayaan antara kota dan desa mendorong gelombang urbanisasi yang signifikan, di mana warga desa berpindah ke kota demi meraih kualitas hidup yang lebih baik. Namun, tanpa adanya pembangunan yang merata dan inklusif, proses migrasi ini dapat menghasilkan area-area baru yang diwarnai kemiskinan di dalam kota. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan pendekatan pembangunan yang sinergis, yang memadukan kemajuan teknologi di perkotaan dengan potensi sumber daya yang ada di pedesaan, untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis mereka

(Nasution et al., 2023)

E. Tantangan dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1. Permasalahan Ketimpangan dan Kemiskinan

Ketidakadilan dalam ekonomi dan kemiskinan merupakan dua masalah mendasar yang saling berhubungan dalam proses pembangunan suatu negara. Situasi ini muncul ketika distribusi pendapatan tidak seimbang, yang berarti hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan akses ke pembiayaan dan teknologi yang dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi. Ketidakadilan yang besar menghalangi upaya untuk mengurangi kemiskinan, karena individu yang berada di lapisan sosial ekonomi rendah sering kali tidak memiliki cukup sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, yang pada akhirnya membuat mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan.

Secara mendalam, masalah kemiskinan sering kali berasal dari kurangnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang terjangkau. Tanpa pendidikan yang cukup, individu mengalami kesulitan untuk bertahan di pasar kerja yang semakin ketat, sehingga menghalangi mereka untuk memperbaiki taraf hidup. Ketidaksetaraan dalam akses ini menciptakan perbedaan sosial yang besar antara kelompok yang beruntung dan kelompok yang terpinggirkan, dengan ketidakadilan sistemik yang menjadikan kemiskinan sebagai kondisi yang sulit untuk diubah dan cenderung diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Aisyah et al., 2023).

Dampak dari angka kemiskinan dan ketidaksetaraan yang tinggi tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat serta mengurangi kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Ketidaksetaraan yang sangat mencolok dapat menimbulkan perasaan tidak adil, yang bisa memicu konflik antar kelompok dan mengurangi ikatan sosial. Oleh sebab itu, perlu ada tindakan yang mengutamakan redistribusi kekayaan dan memperkuat perlindungan sosial yang menyeluruh, agar kemajuan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai keadilan dalam distribusi sosial (Kuciswara et al., 2021).

2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan yang Berkelanjutan

Strategi yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan menekankan pada penyediaan kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Upaya ini dilakukan dengan cara memperkuat sektor Usaha Kecil dan Menengah, menawarkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan memastikan semua individu memiliki keterampilan yang

cukup dan akses ke dana, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu, melainkan menjadi sebuah inisiatif kolektif yang dapat secara berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpendapatan rendah.

Di sisi lain, dimensi keberlanjutan menekankan bahwa usaha saat ini untuk meraih kemakmuran tidak boleh mengorbankan perlindungan lingkungan serta ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab menjadi pilar utama untuk memastikan kemakmuran yang berkelanjutan. Pembangunan yang sadar akan lingkungan ini menjamin bahwa kemajuan material yang dicapai sejalan dengan upaya pelestarian ekosistem, sehingga membentuk ketahanan nasional yang kokoh terhadap krisis iklim di masa depan dan perubahan ekonomi global.

3. Peran Pemerintah, Swasta, Masyarakat

Pemerintah memiliki peran yang signifikan sebagai pengatur dan pembuat keputusan, memastikan lingkungan ekonomi yang menguntungkan untuk seluruh pihak. Dengan menciptakan peraturan yang adil dan mengembangkan infrastruktur yang tepat, negara berupaya untuk mendistribusikan sumber daya secara merata guna mengurangi ketidaksetaraan sosial. Langkah-langkah pemerintah, seperti subsidi yang terarah dan program perlindungan sosial, ditujukan untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan bahwa warga yang kurang beruntung tetap memiliki jaringan penyangga ketika menghadapi perubahan ekonomi global (Candra Putra, 2022).

Sektor swasta memiliki fungsi penting sebagai pendorong utama kemajuan lewat inovasi, investasi, dan penciptaan berbagai peluang kerja. Dengan efisiensi dan sumber daya yang dimiliki, perusahaan tidak hanya membantu dalam pertumbuhan produk domestik bruto, namun juga berkontribusi dalam pemindahan teknologi dan pembentukan keterampilan tenaga kerja. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan, sektor swasta pun bisa terlibat dalam inisiatif pengembangan komunitas, memastikan bahwa keuntungan yang mereka peroleh berkaitan dengan peningkatan taraf hidup warga di lingkungan mereka (Oriyanto Eks Enus, 2025).

Peran masyarakat adalah untuk berperan sebagai anggota yang aktif serta sebagai pengawas dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Keterlibatan masyarakat dalam wirausaha mandiri, pemahaman mengenai pajak, dan pengawasan sosial terhadap kebijakan publik sangat krusial untuk menjamin pertanggungjawaban. Komunitas yang memiliki tanggung jawab dan kesadaran bersama menciptakan modal sosial yang kokoh, sehingga perkembangan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan tidak hanya didorong dari atas oleh mereka yang berkuasa, tetapi

berkembang secara alami dari tingkat dasar untuk kepentingan bersama (Endang et al., 2021).

SIMPULAN

Perkembangan perekonomian Indonesia menunjukkan peran penting, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, jika keuntungan tersebut dibagikan secara merata. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan antar wilayah dan distribusi yang tidak seimbang, yang perlu diatasi melalui strategi yang mendukung pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan, agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebuah Perspektif dari Indonesia. *JURNAL ECONOMINA*, *2*(12), 3722–3736.

Aji, M. R. B., & Wijayanti, D. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 379–389.

Awary, N., & Nilasari, A. (2025). *The Influence of Poverty , Unemployment , and Economic Growth on the Human Development Index (HDI) in East Java Province*. *4*(4), 1615–1630.

Candra Putra, D. (2022). Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *1*(6).

Choiri, A., Wibowo, W., & Arifa, I. (2025). Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(3).

Dieda, D., Azzahra, G., Desmawan, D., Pembangunan, I. E., Ekonomi, F., & Tirtayasa, S. A. (2023). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 34 Provinsi Indonesia*. *7*, 22034–22044.

Durrotun Kasiyati,. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. *08*(02), 223–233.

Endang Hermawan, O., Pebriyani, D., Nurita Julianty, D., Safitri, F., & Tri Laksono, G. (2021). *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan*

Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *2*(1).

Economia, J., Ali, M., & Agustina, L. K. (2024). *How Do Economic Development Indicators Affect the Poverty Level? Evidence from West Nusa Tenggara*. *20*(2), 183–196.

Gozali, N., & Nurikmah, J. (2025). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia The Impact of the Open Unemployment Rate on the Poverty Rate in Indonesia from 2014 to 2023*. *8*(1), 1–17.

Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Alghifary, R., Hamdani, M. D., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-ekonomi Antar Masyarakat. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Issue 4).

Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, *2*(2), 79–88.

Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, *6*(3), 1–9.

Nurhasanah, L., Muzdalifah. (2024). Pemicu Ketimpangan Pendapatan di Regional Kalimantan Tahun 2015-2020. *Jurnal Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 7(1), hal 31-40.*

Olivia, I., Imran, F. F., & Aditya, M. R. (2024). Kebijakan moneter dan fiskal: Analisis dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, *2*(1), 29–34.

Oriyanto Eks Enus, B. I. W. (2025). *Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Meningkatkan KualitasPendidikan di Daerah Terpencil Papua: Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat*.

Sari, P. H., & Santoso, R. P. (2024). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, *3*(2), 220–226.

Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, *5*(1), 77–85.

Saputra, B., Madani, S., & Mahmudi, B. (2022). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*.